

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA,
PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun
2010 – 2014)**

***THE INFLUENCE OF EXECUTIVE CHARACTER, FAMILY
OWNERSHIP, PROFITABILITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON
TAX AVOIDANCE IN INDONESIA
(Study on Manufacturing Companies Listed in BEI for the Periode 2010 – 2014)***



Disusun Oleh :

RAHMAT AJIE

20120420130

FAKULTAS EKONOMI / AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA,
PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2014)

***THE INFLUENCE OF EXECUTIVE CHARACTER, FAMILY OWNERSHIP,
PROFITABILITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX
AVOIDANCE IN INDONESIA***

(Study on Manufacturing Companies Listed in BEI for the Period 2010 – 2014)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

RAHMAT AJIE

20120420130

**FAKULTAS EKONOMI / AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA,
PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2014)

***THE INFLUENCE OF EXECUTIVE CHARACTER, FAMILY OWNERSHIP,
PROFITABILITY AND *CORPORATE GOVERNANCE* ON TAX
AVOIDANCE IN INDONESIA***

(Study on Manufacturing Companies Listed in BEI for the Periode 2010 – 2014)



Diajukan Oleh

RAHMAT AJIE
20120420130

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Pembimbing

Rizal Yaya, SE., M.Sc., Ph.D., Ak., CA
NIK : 19781218 19990414 43068

Tanggal : **24 November 2015**

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA,
PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2014)

***THE INFLUENCE OF EXECUTIVE CHARACTER, FAMILY OWNERSHIP,
PROFITABILITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX
AVOIDANCE IN INDONESIA***

(Study on Manufacturing Companies Listed in BEI for the Periode 2010 – 2014)

Diajukan Oleh

**RAHMAT AJIE
20120420130**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan didepan
Dewan Penguji Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal **17 Desember 2015**
Yang terdiri dari

Dr. Rizal Yaya, SE.,M.Sc.,Ph.D.,Ak.,CA
Ketua Tim Penguji

Dr. Muhammad Akhyar Adnan.,MBA.,Ak
Anggota Tim Penguji

Dr. Bambang Jatmiko.,SE.,M.Si.,
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr.Nano Prawoto, S.E., M.Si.
NIK : 19660604199202 143 016

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Rahmat Ajie

NomorMahasiswa : 20120420130

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA, PROFITABILITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2014)”** tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata didalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Rahmat Ajie

MOTTO

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui.

(Q.S Al-Alaq 1-5)

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

(Nabi Muhammad SAW)

Allah tidak akan mengubah nasib suatu kamu sampai mereka sendiri yang mengubah dirinya.

(Q.S : An-Naml:77)

Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu akan menjagamu sedangkan kamu yang menjaga harta, ilmu itu hakim sedangkan harta dikenakan hukum, harta akan berkurang jika digunakan sedangkan ilmu akan bertambah bila digunakan.

(Ali Bin Abi Thalib)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu tidak selesai (dalam suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah 6-8)

“Orang tua tak pernah menyerah untuk membesarkan anak, maka jangan lah menyerah untuk membesarkan cinta kepada orang tua dan berusaha untuk membuat mereka bangga”

(Rahmat Ajie)

Thanks To :

- ❖ Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, dan selalu memberikan segala kemudahan .
- ❖ My Parents, terima kasih atas semua waktu, tenaga, kasih sayang yang telah kalian berikan kepada ku. Sampai aku bisa menjadi orang yang bisa membanggakan kalian, walaupun belum bisa bahkan tak akan membalas atas apa yang telah kalian berikan.
- ❖ Abang dan Kakak yang selalu mendukung apa yang aku kerjakan, dan selalu memberikan motivasi agar aku semangat dalam menjalankan hari hariku.
- ❖ Dosen pembimbing Pak Rizal Yaya, terima kasih sudah memberikan ilmu, sehingga skripsi ini terselesaikan atas bimbingan yang Bapak berikan.
- ❖ Seluruh keluarga besarku, sodara sodara ku, terima kasih atas dukungan kalian semua.
- ❖ My second family, Puji, Mentari, Dovi, Imam, Adit, Ricky, Iqnas dan Rizky terima kasih telah menemani selama beberapa tahun, semoga kekeluargaan kita ini akan terus selamanya . Cepet menyusul dan kita bisa kumpul lagi.
- ❖ My best friend Meydina, Puji, Mentari, Doviandra, Karina Julian, Yoska. Terima kasih atas motivasinya yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi sampai selesai. Semoga selamanya selalu bersama. Walaupun terkadang kalian menyebalkan.
- ❖ Anak anak asuhku D'Linjies (Uning, Fatiya, Anthia, Tasha, Irma, Mentari) tetaplah berada dibawah naunganku ya, jangan berpaling. Haha
- ❖ Teman seperjuangan Yoska, Umay, Iday, Iday, Olga, Hestong thanks sudah menemani hari – hariku selama di Jogja. Tempat berbagi kebahagiaan, kesedihan terkadang saling mengejek biar bisa ketawa.

Semoga kalian cepat nyusul yaa, jangan banyaak main. Skripsinya dikerjain jangan cuma dipikirin.

- ❖ Anak anak genk lemes, Agnesya, Andri, Diyanitha, Hendra dan Rini Mustika. Semoga pertemuan kita menjadi awal yang baik untuk bersilahturahmi. Semangaaaaaat skripsweet nya, biar bisa wisuda bareng.
- ❖ Buat Marc, Deasy, Yanuar, Mbak Nur dan Radita yang selalu kasih info, jalan bareng, walaupun kadang tergesah – gesah, hahaa ..
- ❖ Akuntansi D 2012, terima atas segala masukan yang telah diberikan. Tetaap semangaaaaaaaaaaaaaat yaauuuuu
- ❖ Anak anak KKN +95, terima kasih telah membimbingku untuk menjadi ketua yang baik. Semoga masukan yang kalian berikan bermanfaat buatku dan semoga kekeluargaan kita selama 30 hari kemarin tak akan terlupakan. Fight Mojo.
- ❖ Semua yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan sripsi ini, dan maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Almamaterku, terima kasih telah menjadi media dalam menambah wawasan dengan berbagai pengetahuan yang berguna sebagai bekal setelah meninggalkan UMY.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak (tax avoidance) diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Variabel independen yang diteliti antara lain karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan corporate governance. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, ukuran perusahaan, leverage dan Net Operating Loss. Sampel penelitian ini menggunakan 12 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2014. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas, corporate governance, penghindaran pajak

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of executive character, family ownership, profitabilitass (ROA), and corporate governance on tax avoidance. Tax avoidance are dependent variable on this research. Tax avoidance wa measured by cash effective tax rate (CETR). The executive character, family ownership, ROA, and corporate governance are independent variables on this research. This research also uses the control variables are firm size, leverage and net operating loss. The sample of this research was 12 manufactur companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2010 - 2014. This research used purposive sampling criteria and double linear regress ion analysis test. The result show that character executive have significant positively effect on tax avoidance and family ownership, profitabilitass (ROA) and corporate governance have significant negatively effect on tax avoidance.

Keywords: character executive, family ownership, profitibility, corporate governance, tax avoidance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, ilmu dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap Penhindaran Pajak sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, dan selalu memberikan segala kemudahan .
2. Bapak Dr. Nano Prawoto, S.E, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
3. Ibu Ietje Nazaruddin, M.Si.,Akt.,CA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah

memberi petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.

4. Bapak Rizal Yaya, SE.,M.Sc.,Ph.D.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran serta dukungan hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dosen penguji, Pak Rizal, Pak Akhyar, Pak Bambang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan.
7. Ayah dan Ibu, terima kasih atas semua waktu, tenaga, kasih sayang yang telah kalian berikan kepada ku. Sampai aku bisa menjadi orang yang bisa membanggakan kalian, walaupun belum bisa bahkan tak akan membalas atas apa yang telah kalian berikan.
8. Abang dan Kakak yang selalu mendukung apa yang aku kerjakan, dan selalu memberikan motivasi agar aku semangat dalam menjalankan hari hariku.
9. Seluruh keluarga besarku, sodara sodara ku, terima kasih atas dukungan kalian semua.
10. Semua sahabat dan teman seperjuangan yang sekarang sama – sama sibuk melanjutkan skripsi, semoga diberikan kemudahan agar cepat terselesaikan.
11. Seluruh teman – teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi angkatan 2012 atas kebersamaannya selama kuliah.

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini tentunya masih terdapat kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna pengembangan penelitian skripsi selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Rahmat Ajie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Agensi	8
2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	9
3. Keuntungan dan Kerugian dari Penghindaran Pajak	10
4. Karakter Eksekutif	11
5. Risiko Perusahaan dan Karakter Eksekutif	12
6. Kepemilikan Keluarga	14

7. Profitabilitas	14
8. <i>Corporate Governance</i>	15
a. Kepemilikan Institusional	18
b. Struktur Dewan Komisaris	19
c. Komite Audit	20
d. Kualitas Audit	20
B. Hipotesis	22
C. Model Penelitian	30
BAB III METODA PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian	32
B. Jenis Data	32
C. Teknik Pengambilan Sampel	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Defisini Operasional Variabel Penelitian	33
F. Variabel Control	36
G. Uji Statistik Deskriptif	37
H. Uji Asumsi Klasik	37
I. Model Analisis Regresi Berganda	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Analisis Deskriptif	43
C. Uji Asumsi Klasik	44
D. Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	47
E. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi	59
C. Keterbatasan	63
D. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1.	Proses Pengambilan Sampel	42
4.2.	Statistik Deskriptif	43
	a. Panel A	43
	b. Panel B	43
4.3.	Hasil Uji Normalitas	45
4.4.	Hasil Uji Multikolinearitas	45
4.5.	Hasil Uji Autokorelasi	46
4.6.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
4.7.	Hasil Uji Regresi	47

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Penelitian	31
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011).

Pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat. Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh *high-powered* insentif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2004).

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tentulah sangat merugikan negara. Pimpinan – pimpinan yang bertugas sebagai pengambil keputusan sangat berpengaruh penting terhadap hal tersebut, karena setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lainnya.

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini

tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.*, (2010) hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan.

Fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30%.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan.

Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Budiman (2012) dan Armstrong *et al.*(2012). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Namun Irawan (2012) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain kompensasi, eksekutif juga akan bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika ia memiliki saham perusahaan.

Jenis karakter individu (*exekutive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-takers* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Penelitian ini akan menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menggunakan variabel Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan homogen sehingga bisa mewakili populasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN KELUARGA, PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

Pengaruh pajak yang begitu besar pada negara merupakan suatu hal yang wajib dipahami untuk kepentingan bersama. Jenis karakter individu yang memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan bagaimana pengaruh pimpinan perusahaan dalam menjalankan fungsinya, dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah tafsir maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan objek karakter eksekutif perusahaan dengan variabel yang di teliti yaitu *risk-taker*, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dari latar belakang yang diperoleh maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan : “apakah karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* yang meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah untuk menguji “apakah karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* yang meliputi kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan manfaat terhadap *tax aviodance* yang dapat dipengaruhi oleh karakter perusahaan, perusahaan keluarga dan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bahan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan principle.

Menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010) pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Selain itu terdapat beberapa perbedaan yang bisa saja terjadi antar kepentingan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam pemutusan suatu kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk hasil akhir yang diinginkan pemegang keputusan dalam perusahaan, serta kepentingan pemegang saham

yang menginginkan adanya pemenuhan segala kewajiban yang harus dipenuhi (Masri dan Martini, 2011).

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dipungut dari masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah tidak biasa hanya mengandalkan penerimaan dari pendapatan Non-Pajak yang jumlahnya tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Hal ini juga berbanding terbalik dengan penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Hanlon *et al.*, (2010), mengatakan bahwa pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi bervariasi. Selain itu pengukuran tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.*, (2010) berkenaan tentang kas yang dikeluarkan untuk pembiayaan pajak bagi laba sebelum pajak. Selain itu Merks (2007), menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang dimungkinkan dalam undang – undang pajak, yakni :

- a. Melakukan pemindahan subjek dan objek pajak ke negara – negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas satu jenis penghasilan.

- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping* dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.

Penciptaan suatu alternatif baru dari aktivitas *tax avoidance* dalam perencanaan pajak dapat menimbulkan penghematan dalam besarnya pajak oleh perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan lebih memberikan perhatian dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat hidup masyarakat (Annisa, 2011)

3. Keuntungan dan Kerugian dari Penghindaran Pajak

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan penghindaran pajak, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan tindakan penghindaran pajak :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen *et al.* 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan penghindaran pajak diantaranya adalah :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010). Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
2. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006).

4. Karakter Eksekutif

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sistem kepemimpinan sebuah perusahaan atau organisasi. Eksekutif dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang dipimpinnya sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar kepada perusahaan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan memiliki resiko.

Menurut Low (2006), menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pimpinan perusahaan biasanya memiliki 2 karakter yang

berbeda dalam pengambilan keputusan yaitu *Risk Taker* dan *Risk Averse*. *Risk Taker* merupakan karakter pemimpin yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan untuk perusahaan, sedangkan *Risk Taker* merupakan pemimpin yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Lawlen (2003), mengatakan bahwa eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* cenderung tidak ragu – ragu dalam mengambil resiko pembiayaan dari hutang agar perusahaan bertumbuh dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Hal ini berbanding terbalik dengan *risk averse* yang tidak menyukai resiko dan lebih memiliki kecenderungan untuk tidak mengambil resiko apabila keputusan tersebut dapat menimbulkan resiko.

5. Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*) dan Karakter Eksekutif

Menurut Hartono (2008) resiko ada kaitanya dengan *return* yang diperoleh perusahaan, bahwa resiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula resiko yang ada. Seorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa kemungkinan terjadinya perbedaan hasil yang diharapkan (*expected return*) dengan hasil yang benar-benar terjadi (Penman, 2007).

Hampir senada dengan Paligorova (2010) mengartikan risiko

perusahaan (*corporate risk*) merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya resiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2010).

Coles *et al.*, (2004) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse* (Coles *et al.*, 2004). Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2003) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut.

6. Kepemilikan Keluarga

Prakosa (2014), menyatakan bahwa kepemilikan keluarga merupakan perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, berdasarkan keturunan

atau warisan dari orang-orang yang lebih dulu menjalankannya, atau keluarga yang mewariskan perusahaannya kepada generasi yang akan datang.

Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga. Itu juga menggabungkan sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal suami dan istri, anak, dan keponakan, (Susanto *et al*, 2007).

Hidayanti (2013) Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki dominan kepemilikan saham oleh keluarga diperusahaan. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia.

7. Profitabilitas

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates (ETRs)* yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. *ROA* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. *ROA* dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai *ROA*, maka akan semakin baik kinerja

perusahaan tersebut. *ROA* memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

8. *Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu Transparansi (*transparency*), Kemandirian (*independency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kewajaran (*fairness*).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan.

Sulistyanto dan Wibisono (2003) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang

ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Pengungkapan yang luas akan dapat memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan untuk kegiatan dalam perusahaan yang dilakukan oleh para manajer untuk kepentingan masing – masing. Ada 5 komponen utama yang diperlukan untuk memenuhi konsep *good corporate governance*, yaitu :

a. *Transparansi (Transparency)*

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi.

b. *Akuntabilitas (accountability)*

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para pemegang saham yaitu masyarakat luas.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi hukum serta peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis jangka panjang sehingga diakui sebagai perusahaan yang baik.

d. Kemandirian (*Independency*)

Untuk mendukung *corporate governance* yang baik perusahaan diatur secara mandiri dengan kekuasaan yang seimbang, yaitu dimana tidak ada salah satu bagian perusahaan yang mendominasi serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

Kelimitya memiliki keterkaitan penting dalam penerapan prinsip *good corporate governance* yang dapat dibuktikan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Annisa 2011). Terdapat keterbatasan terkait dengan penelitian *corporate governance* sehingga perlu menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin *et al.*, 2003). Variabel yang digunakan sebagai proksi untuk *corporate governance* meliputi variabel seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan yang besar terhadap investasi perusahaan termasuk diantaranya investasi saham. Sehingga keberadaannya dianggap penting sebagai alat pengontrol atau pemantau dalam perkembangan investasi perusahaan.

Kepemilikan institusional berfokus pada pengungkapan sukarela yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar dan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Ajinkya, 2005).

Annisa (2011) menyebutkan bahwa pemegang saham memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* di perusahaan, selain itu semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka sebaliknya jika pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi.

b. Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan pengawasan yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menasehati direksi apabila melakukan kesalahan. Namun dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam

dewan komisaris masing – masing anggotanya memiliki kedudukan yang seimbang.

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertujuan sebagai pengawasan serta dengan memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab yang memberikan nasehat kepada direksi.

Dewan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak – pihak lain yang terkait (Annisa 2011). Untuk penelitian *corporate governance* dalam struktur dewan dilakukan oleh Setyaningrum (2005) yang meneliti tentang proksi jumlah dewan komisaris serta presentase komisaris independen dan menemukan hasil bahwa jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat surat hutang.

c. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite ini berfungsi untuk mengawasi perusahaan publik dalam pembuatan laporan serta pengawasan internal perusahaan, hal ini telah diputuskan oleh BEI tentang keharusan dalam pembentukan komite audit yang diketuai oleh komisaris independen

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu

perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah – masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004).

Saputra (2012) menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan manajemen terhadap peraturan yang berlaku dilakukan oleh komite audit, selain itu komite audit bertugas dalam pertanggungjawaban dalam pelaporan hasil kinerja kepada publik secara transparan untuk memenuhi *good corporate governance*.

d. Kualitas Audit

Indikasi yang paling penting dalam *corporate governance* adalah adanya bukti pengungkapan yang akurat dan terpercaya serta transparansi. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk memonitoring dalam penurunan biaya agensi adalah audit. Pentingnya transparansi terhadap pemegang saham yang dapat dicapai dengan melakukan pelaporan untuk hal – hal yang terkait perpajakan pada pasar modal serta pertemuan antar para pemegang saham.

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu keputusan bisnis (Mayangsari 2003).

Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut termasuk kedalam KAP *The Big Four* atau tidak (Susiana dan Herawaty, 2007). Terdapat empat KAP *The Big Four* yang disebut pula sebagai *Big Four Worldwide Accounting Firm*, yaitu :

- a. *Price WaterHouse Coopers (PWC)*
- b. *Ernst and Young*
- c. *The Deloitte Touche Thomatsu, serta*
- d. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*

Selain itu disebutkan pula KAP yang besar lebih independen dalam pelaporannya karena dapat bertahan dari berbagai tekanan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan terhadap adanya pelanggaran (Watts *et al.*, 1986)

B. Hipotesis

1. Risk taker terhadap penghindaran pajak

Karakter eksekutif yang *risk taker* akan lebih berani dalam hal membuat keputusan melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut (Lewellen 2003). Hal ini sejalan dengan pernyataan Maccrimon dan Wehrung (1990), menyebutkan eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi.

Dyreng *et al*, (2010) melakukan pengujian terhadap bagaimana pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak di perusahaan, dengan hasil pimpinan perusahaan sebagai eksekutif secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Eksekutif yang memiliki kepentingan tinggi dan keinginan kuat untuk memperoleh sesuatu yang lebih dalam mencapai tujuannya, akan lebih berani mengambil resiko dalam keputusan bisnisnya dalam mencapai tujuan termasuk kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk melakukan pengujian adalah :

H₁ : Eksekutif yang bersifat risk-taker berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan

dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Penelitian Chen *et al.* (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₂: Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

3. Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. *ROA* berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya

(Siahan, 2004). Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa *ROA* menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi *ROA*, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196).

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari *ROA*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010).

Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H₃: ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

4. Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dengan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institutional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat pada

peraturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai bagian dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan penghindaran pajak (Dewi, 2013)

Pengujian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pohan (2008) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga akan mengurangi kemungkinan dalam penghindaran pajak.

Para investor institusional cenderung memiliki tingkat ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku dalam menghasilkan laba diperusahaan, sehingga dapat mengontrol dan mengawasi manajemen dalam menghasilkan laba. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk pengujian ini adalah :

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

5. Struktur Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Tugas pengawasan dilaksanakan oleh komisaris independen bersama dengan dewan lainnya dalam menentukan strategi kebijakan yang terkait dengan pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen maka perumusan strategi perusahaan yang dilakukan bersama manajemen perusahaan dan *stakeholder* akan memberikan hasil yang efektif termasuk dengan kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Hanum, 2013 dalam Dewi, 2013).

Hasil pengujian Annisa (2011), menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini tidak sejalan penelitian yang dilakukan

oleh Pohan (2008) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak.

Dewan komisaris, bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap keputusan manajemen mengenai kebijakan apa yang akan diambil untuk keuntungan perusahaan namun tetap pada jalur yang semestinya dan tidak melanggar hukum yang ada termasuk mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk melakukan pengujian adalah :

H₅ : Struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

6. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara selektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik (Andriyani, 2008).

Penelitian Kurniasih dan Sari (2011), menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi (2013) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian

membuktikan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah penghindaran pajak.

Dalam menjalankan fungsinya komite audit melakukan pengendalian dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen agar sesuai dan tidak melanggar peraturan yang sudah ada, sehingga tidak ada kecurangan berkaitan dengan pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk melakukan pengujian adalah :

H₆ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

7. Kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Annisa (2011), mengatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* lebih cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP yang bukan termasuk dalam *The Big Four*, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak dalam penyusunan laporan keuangan.

Annisa (2011) menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil bahwa keduanya saling berpengaruh secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) yang menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan.

Semakin tinggi kualitas auditor dalam melakukan pengauditan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang diberikan, sehingga dapat menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat diperoleh untuk melakukan pengujian adalah :

H₇ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

8. Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah Cash ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – political cost theory (Watts dan Zimmerman, 1986). Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₈ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

9. Leverage dan Penghindaran Pajak

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka Cash ETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Hal tersebut mendasari dirumuskan hipotesis :

H₉ : Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

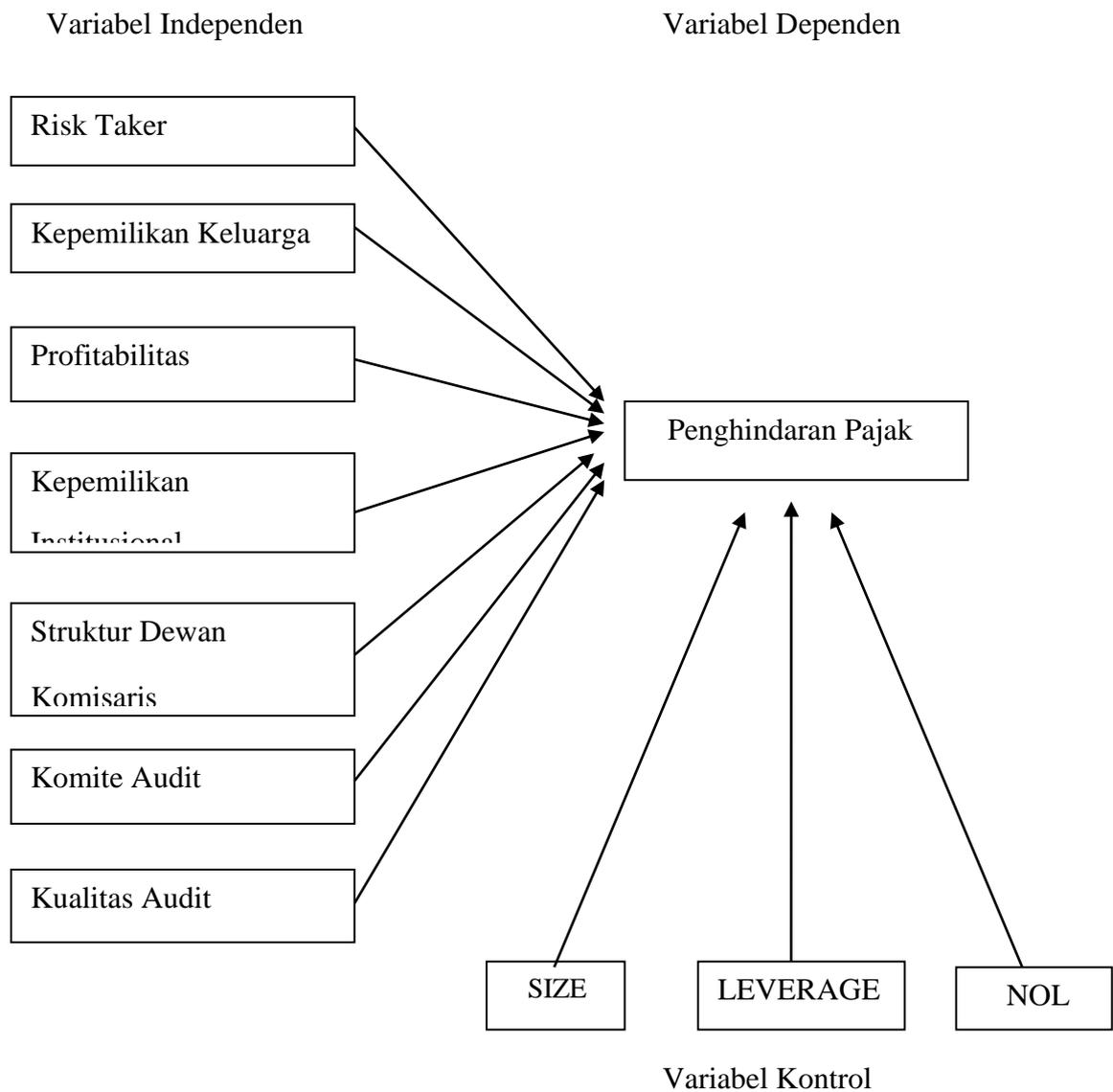
10. Net Operating Loss dan Penghindaran Pajak

Secara logika, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis penelitian.

H₁₀ : Net Operating Loss berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

C. Model Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap karakter eksekutif, kepemilikan keluarga serta *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang biasanya identik dengan pabrik. Perusahaan manufaktur dipilih karena pertimbangan agar data yang diperoleh dapat mewakili populasi dengan perusahaan lainnya sehingga mendapatkan gambaran kekhususan hasil dari jenis perusahaan serta variasi data yang sangat mungkin didapat.

B. Jenis Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perbankan yang relevan dari tahun 2010 - 2014. Data – data tersebut berupa laporan keuangan tahunan yang lengkap beserta laporan auditor independen.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan *Annual Report* dari tahun pengamatan 2010 – 2014.
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan auditan per – 31 desember dari tahun 2010-2014 dan masih melakukan kegiatan ekonomi.

3. Perusahaan memiliki data lengkap dan relevan yang dibutuhkan dalam variabel penelitian yang telah ditentukan dari tahun 2010 – 2014
4. Perusahaan yang memperoleh laba dari tahun pengamatan (2010 – 2014). Laba yang dimaksudkan sebagai dasar pengenaan besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan pada perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan dengan membaca, mengumpulkan serta mencatat data, serta informasi yang di perlukan dalam laporan keuangan yang diperoleh dari pojok BEI dan dengan mengakses situs www.idx.com dan www.sahamok.com.

E. Definisi Operasioanal Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Dewi (2013) menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah teknik penghindaran pajak secara legal dengan mengurangi pajak terutang dengan mencari kelemahan pada peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam penelitian ini perhitungan penghindaran pajak dihitung melalui *CASH ETR* (*Cash effective tax rate*) yang dikeluarkan untuk biaya pajak dan dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012).

Dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

CASH ETR (Y) yang semakin besar, mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Variabel Independen

a. Karakter Eksekutif

Resiko perusahaan digunakan untuk mengetahui karakter eksekutif. Dalam hal ini mengarah pada penelitian Dyreng *et al.*, (2010), tentang pengakuan resiko perusahaan dihitung melalui deviasi standar *EBITDA* (*Earning Before Income Tax, Depreciation and Amortization*) yang diwakili huruf E dan dibagi dengan total asset, dengan rumus standar berikut :

$$RISK = \sqrt{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2} / (T - 1)$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi total asset dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya resiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taker* atau *risk averse*, semakin besar resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taker*, begitu pula sebaliknya semakin kecil resiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse* (Budiman, 2012).

Coles *et al.*, (2004) menyebutkan bahwa resiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse* (Coles *et al.*, 2004). Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

b. Kepemilikan Keluarga

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 20% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga merupakan dummy variable, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 20%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

c. Profitabilitas

Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

d. Kepemilikan Institusional

Merupakan kepemilikan saham secara mayoritas yang dimiliki oleh perusahaan terkait, bila suatu perusahaan memiliki lebih dari satu pemegang saham maka kepemilikan dapat diukur dengan penghitungan total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilik perusahaan. Penelitian ini merujuk pada kepemilikan individual pada kepemilikan institusi dengan rumus sebagai

berikut : ***Proporsi Investor Institusional*** =

$$\frac{\Sigma \text{saham institusi}}{\Sigma \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

e. Proporsi Dewan Komisaris

Penelitian ini menggunakan $\pm 30\%$ dari total keseluruhan anggota komisaris agar terpenuhinya corporate governance. Dengan rumus :

$$\textbf{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisari}} \times 100\%$$

f. Komite Audit

Pengukuran komite audit didasarkan pada jumlahnya. Merujuk pada penelitian Dewi (2013), komite audit sekurang – kurangnya beranggotakan 3 orang, yang diketuai komisaris independen yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite dalam suatu perusahaan yang digunakan sebagai alat ukur. Komite audit = Jumlah komite audit.

g. Kualitas Audit

Hal ini dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dapat diukur berdasarkan kecilnya KAP yang melakukan audit pada suatu perusahaan, yaitu KAP *The Big Four* atau KAP *non The Big Four* (Sulistriani dan Sudarno, 2012). Empat KAP *The Big Four* yaitu; *Price Waterhouse Coopers (PWC)*, *Ernst & Young*, *The Deloittee Touche Thomatsu* dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*. Kualitas audit diukur dengan variabel dummy, dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* diberikan skor 1 dan untuk *non The Big Four* diberi skor 0.

3. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu :

- a. *Size* merupakan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logaritma total aset pada perusahaan.
- b. *Leverage* merupakan sumber pendanaan dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan.
- c. *Net Operating Loss (NOL)*, yaitu merupakan kondisi dimana perusahaan akan mendapatkan insentif pajak dengan tidak memiliki kewajiban membayar pajak, hal ini diukur dengan memberikan angka 1 bagi perusahaan yang periode sebelumnya menderita kerugian dan angka 0 jika perusahaan pada periode sebelumnya tidak mengalami kerugian.

F. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data dan gambaran keseluruhan sampel yang telah dikumpulkan serta memenuhi syarat bagi sampel penelitian dilihat dari nilai maksimum-minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

G. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini untuk menguji model regresi variabel dependen dan independen yang memiliki kontribusi normal (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas menggunakan uji kolmogrov Smirnov, yaitu membandingkan p value

dengan tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan program SPSS. Jika p value lebih besar dari tingkat signifikansi 5% maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya hubungan korelasi antar variabel independennya. Pengujiannya dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation faktor (VIF). Jika nilai VIF < 10 atau tolerance $> 10\%$, maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui bahwa varian dari variabel suatu pengamatan dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam pengamatan. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan pengujian gletser dengan meregresi nilai absolute residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen (Dewi, 2013). Jika nilai variabel bebas melebihi α (tingkat signifikansi $> 0,05$), maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka menunjukkan adanya autokorelasi yang dapat muncul dari penelitian yang berurutan dan saling berkaitan. Untuk melihat adanya autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson* dengan ketentuan :

$0 < dw < dl$ = ada autokorelasi positif.

$dl \leq dw \leq du$ = tidak ada autokorelasi positif

$4 - dl < dw < 4$ = ada autokorelasi negative

$4 - du \leq dw \leq 4 - dl$ = tidak ada autokorelasi negative

$Du < dw < 4 - du$ = tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

H. Model Analisis Regresi Berganda

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, menggunakan metode regresi linier berganda dengan standart error e . Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + e$$

Keterangan :

Y = *Cash Effective Tax Rate* perusahaan i pada tahun t

X_1 = Resiko perusahaan (*corporate risk*) i pada tahun t

X_2 = Kepemilikan keluarga perusahaan i pada tahun t

X_3 = Profitabilitas perusahaan i pada tahun t

X_4 = Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t

X_5	= Proporsi dewan komisaris perusahaan i pada tahun t
X_6	= Komite audit perusahaan i pada tahun t
X_7	= Kualitas audit perusahaan i pada tahun t
X_8	= Ukuran perusahaan i pada tahun t
X_9	= <i>Leverage</i> perusahaan i pada tahun t
X_{10}	= <i>Net operating Loss</i> i pada tahun t
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_{10}$	= Estimasi OLS pada $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$
e	= Error

Regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependennya serta menunjukkan arah pengaruh.

1. Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tentang semua variabel independen dalam model regresi yang berpengaruh terhadap variabel independen secara bersama – sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0.05$). apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari F_{tabel} , maka berarti variabel bebasnya secara bersama – sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis, sehingga dapat diterima.

2. Uji Statistik T

Uji statistik t, digunakan untuk menguji hipotesis bagaimana pengaruh masing – masing variabel bebasnya secara sendiri – sendiri terhadap variabel terikatnya, hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat dari kolom signifikansi masing – masing t_{hitung} . Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing – masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasinya antara nol dan satu, jika nilai adjusted R² yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan dependen terbatas dan sebaliknya jika nilai mendekati satu maka memiliki arti variabel dapat memberikan informasi dalam memprediksi variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Hasil pemilihan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2014 diperoleh jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Proses pemilihan sampel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proses Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014	160
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember dari tahun 2010 – 2014	(56)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan, agar kriteria pengukuran sama	(28)
Perusahaan yang tidak memperoleh laba dari tahun pengamatan 2010 - 2014	(30)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap dan relevan yang dibutuhkan dalam variabel penelitian.	(34)
Jumlah Perusahaan	12

Tahun Pengamatan	5
Jumlah Total Sampel Tahun Pengamatan	60

B. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel – variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Panel A

Variabel	Frekuensi	Persentase
FO (Kepemilikan Keluarga)	55	91,7
– < 20%	5	8,3
– > 20%		
KUA (Kualitas Audit)	38	63,3
– KAP Non Big Four	22	36,7
– KAP Big Four		
NOL		
– Perusahaan periode sebelumnya tidak mengalami kerugian	59	98,3
– Perusahaan periode sebelumnya mengalami kerugian	1	1,7

Sumber : Hasil Analisis Data

Panel B

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CashETR	60	-16,0041	74,7942	23,038018	11,2716465
CR	60	-0,0211	312	5,234622	40,2745249
ROA	60	-10,679	41,727	11,306483	11,9002027
KI	60	32,22	98,18	73,0375	17,6279493
SDK	60	0,333	0,667	0,441583	0,1215273
KA	60	2	4	3,03	0,317
SIZE	60	14,68	30,151	24,070017	5,1676951
LEV	60	0,012	0,287	0,070133	0,0655533

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 4.2 Panel A menunjukkan bahwa dari 60 sampel yang diolah, sebanyak 55 (91,7%) sampel bukan *Family Owners* atau Kepemilikan Keluarga, dan 5 (8,3%) sampel adalah milik *Family Owner*. Dari total 60 sampel yang diolah, sebanyak 38 (63,3%) sampel di audit oleh KAP *Non Big Four*, sedangkan yang diaudit oleh KAP *Big Four* sebanyak 22 (36,7%) sampel. Sebanyak 59 (98,3%) sampel pada periode sebelumnya tidak mengalami kerugian, sedangkan yang periode sebelumnya menderita kerugian sebanyak 1 (1,7%) sampel.

Tabel 4.2 Panel B menunjukkan *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR) memiliki rata - rata sebesar 23,0380 dengan standar deviasi 11,2716. *Corporate risk* (CR) memiliki rata - rata sebesar 5,2346 dengan standar deviasi 40,2745.

Profitabilitas (ROA) memiliki rata – rata sebesar 11,3064 dengan standar deviasi 11,90002. Kepemilikan institusional (KI) memiliki rata - rata 73,0375 dengan standar deviasi 17,6279. Struktur Dewan Komisaris (SDK) memiliki rata – rata sebesar 0,4415 dengan standar deviasi 0,1215. Komite Audit (KA) memiliki rata – rata sebesar 3,03 dengan standar deviasi 0,317. *Size* memiliki rata – rata sebesar 24,0700 dengan standar deviasi 5,1676. *Leverage* (LEV) memiliki rata – rata sebesar 0,0701 dengan standar deviasi 0,0655.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas menggunakan metode uji One – Sample Kolmogorov Smirnov (KS) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

	Z	Asymp-sig (2-tailed)	Keterangan
One Sampel K-S	1,174	0,127	Data Berdistribusi Normal

Sumber : Hasil Analisis Data

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh pada tabel 4.3 sebesar $0,127 > 0,05$, berarti data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Ringkasan Hasil Uji multikolinearitas menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
CR	0,723	1,383	Tidak Terjadi Multikolinearitas
FO	0,665	1,503	
ROA	0,422	2,371	
KI	0,551	1,816	
SDK	0,661	1,513	
KA	0,868	1,152	
KUA	0,66	1,514	
SIZE	0,489	2,044	
LEV	0,594	1,684	
NOL	0,905	1,105	

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 4.4 memperlihatkan tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada masing – masing variabel bebas tidak ada yang lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson statistics* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

	dU	DW	4-dU	Keterangan
Durbin Watson	1,594	2,392	2,407	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 4.5 menunjukkan nilai DW-test yang diperoleh sebesar 2,392 berada pada daerah $dU < DW < 4-dU$, artinya tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Ringkasan Hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan uji gletser disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Sig.t	Keterangan
Abse	Constant	0,221	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	CR	0,638	
	FO	0,528	
	ROA	0,893	
	KI	0,246	
	SDK	0,554	
	KA	0,189	
	KUA	0,183	
	SIZE	0,065	
	LEV	0,361	

	NOL	0,331	
--	-----	-------	--

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 4.6 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolut dari residual (abse) hal ini terlihat dari nilai sig. $t > \alpha$ (0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

D. Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficient B	t-Value	Prob (t-Stat)	Keterangan
Constanta	- 0,498	- 0,304	0,762	-
CR	67,949	3,089	0,003	Diterima
FO	2,742	0,455	0,651	Ditolak
ROA	- 0,313	- 2,137	0,038	Diterima
KI	0,236	2,741	0,009	Diterima
SDK	- 52	- 3,693	0,001	Diterima
KA	20,816	5,363	0,000	Diterima

KUA	- 2,386	- 0,658	0,514	Ditolak
SIZE	- 1,160	- 3,740	0,000	Diterima
LEV	- 51, 156	- 1,663	0,103	Ditolak
NOL	- 12,357	- 1,370	0,177	Ditolak
Nilai F Sig.	0,000			
R Square	0,785			
Adjust R Square	0,639			

Sumber : Hasil Analisis Data

Pegujian regresi berganda untuk menguji pengaruh *corporate risk* (CR), Kepemilikan Keluarga (FO), Profitabilitas (ROA), Kepemilikan Institusional (KI), Struktur Dewan Komisaris (SDK), Komite Audit (KA), Kualitas Audit (KUA) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CASH ETR) dengan Total Aset (*Size*), *leverage* dan *Net Operating Loss* (NOL) sebagai Variabel Kontrol. Ringkasan hasil perhitungan regresi berganda disajikan pada tabel 4.7

Hasil Uji regresi pada tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = - 0,498 + 67,949 CR - 0,313 ROA + 0,236 KI - 52 SDK + 20,816 KA - 1,160 SIZE$$

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Variabel resiko perusahaan memiliki hasil koefisien regresi sebesar 67,949 dan *t-value* sebesar 3,089 dengan *p-value* (sig)

sebesar $0,003 < \alpha (0,05)$ dimana nilai sig tersebut lebih kecil dari alpha, hasil tersebut menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *CASH ETR*. Artinya semakin eksekutif bersifat *risk – taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diindikasikan *CASH ETR* yang menurun. Hipotesis pertama (H_1) diterima.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Variabel Kepemilikan Keluarga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,742 dan *t-value* sebesar 0,455 dengan *p-value* (sig) sebesar $0,651 > \alpha (0,05)$. Hasil tersebut menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Hipotesis kedua (H_2) ditolak.

c. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Variabel Profitabilitas memiliki hasil koefisien regresi sebesar $- 0,313$ dan *t-value* sebesar $- 2,137$ dengan *p-value* (sig) sebesar $0,038 < \alpha (0,05)$. Hasil tersebut menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, jika profitabilitas mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hipotesis ketiga (H_3) diterima.

d. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H₄)

Variabel Kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,236 dan *t-value* sebesar 2,741 dengan *p-value* sebesar $0,009 < \alpha (0,05)$. Hasil tersebut menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi manajemen perusahaan.

e. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (H₅)

Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar - 52 dan *t-value* sebesar - 3,693 dengan *p-value* sebesar $0,001 < \alpha (0,05)$. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak mengalami penurunan. Hipotesis kelima (H₅) diterima

f. Hasil Pengujian Hipotesis Keenam (H₆)

Variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 20,816 dan *t-value* sebesar 5,363 dengan *p-value* sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, jika semakin sedikit komite audit maka pengendalian kebijakan keuangan sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan pajak agresif. Hipotesis keenam (H_6) diterima

g. Hasil Pengujian Hipotesis Ketujuh (H_7)

Variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-2,386$ dan *t-value* sebesar $-0,658$ dengan *p-value* sebesar $0,514 > \alpha (0,05)$. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional. Hipotesis ketujuh (H_7) ditolak.

h. Hasil Pengujian Hipotesis kedelapan (H_8)

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-1,160$ dan *t-value* sebesar $-3,740$ dengan *p-value* sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hipotesis kedelapan (H_8) diterima.

i. Hasil Pengujian Hipotesis Kesembilan (H_9)

Variabel *leverage* memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-51,156$ dan *t-value* sebesar $-1,664$ dengan *p-value* sebesar $0,103 > \alpha$

(0,05). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap terhadap penghindaran pajak. Semakin besar biaya bunga atas utang berakibat laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

j. Hasil Pengujian Hipotesis kesepuluh (H₁₀)

Variabel NOL memiliki nilai koefisien regresi sebesar – 12,357 dan *t-value* sebesar – 1,370 dengan *p-value* sebesar 0,177 > α (0,05). Berpengaruh negatif tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada tidaknya kompensasi kerugian pajak tidak berhubungan dengan penghindaran pajak.

3. Hasil Uji F

Hasil Perhitungan tabel 4.7 diperoleh nilai sig. F (*p-value*) $0,000 < \alpha$ (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel – variabel *corporate risk*, kepemilikan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *Net Operating Loss* (NOL) secara simultan terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate*.

4. Koefisien Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,783 atau 78,3% menunjukkan bahwa variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel – variabel

corporate risk, kepemilikan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *Net Operating Loss* (NOL). Sedangkan sisanya sebesar 21,7% dijelaskan variabel lain diluar model penelitian ini.

E. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi, dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang tinggi pula guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yakni untuk mendapatkan cash flow dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* bermanfaat untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Hasil penelitian ini sesuai dengan Dewi (2013) yang menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini juga sesuai dengan Budiman yang menyimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan

penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian penelitian Chet et al. (2010) yang menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Akan tetapi, mendukung hasil penelitian (Sari & Martani, 2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajaka atau diaudit oleh fiskus pajak.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jika profitabilitas mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Profitabilitas adalah faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, hasil penelitian Noor *et al.* (2010) dan (Hanum & Zulaikha, 2013) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang, sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Isnanta (2008) pemilik institusional memiliki pilihan pilihan untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap *opportunitiesnya* dalam melakukan manajemen laba. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian Sheilifer dalam Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri tapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal itu menunjukkan

bahwa jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan . hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen dapat melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Kurniash & Sari, 2013). Penelitian tersebut menunjukkan nilai signifikansi komisaris independen lebih kecil dari 0,05.

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Pohan (2008) BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Akan

tetapi, penelitian ini sejalan dengan Sriwedari (2009) kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan termasuk komite audit yang bertugas dalam pengendalian kebijakan keuangan terutama dalam hal pajak di perusahaan.

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP, terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Annisa (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2013) yang menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan.

Pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Siegfried (1972) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan

perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar biaya bunga atas utang berakibat laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar tetapi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian Ozkan (2001), Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis kesepuluh menunjukkan bahwa *net operating loss* (NOL) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis *net operating loss* (NOL) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat didukung oleh data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada tidaknya kompensasi kerugian pajak tidak berhubungan dengan penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN

SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian penghindaran pajak dengan variabel *corporate risk*, kepemilikan keluarga, profitabilitas, kepemilikan institusional,

struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *Net Operating Loss* (NOL) menunjukkan model yang relatif baik, karena dari variabel – variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 63,9% terjadinya penghindaran pajak.

2. Sepuluh hipotesis yang diajukan ada 6 hipotesis yang diterima antara lain, *corporate risk* (CR), profitabilitas (ROA), kepemilikan institusional (KI), struktur dewan komisaris (SDK), komite audit (KA), ukuran perusahaan (SIZE), sedangkan 5 hipotesis lainnya ditolak, yakni kepemilikan keluarga (FO), profitabilitas (ROA), kualitas audit (KUA), *leverage* (LEV), *net operating loss* (NOL).

B. Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori akuntansi perpajakan dan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya temuan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dalam kancah lapangan.

a) Implikasi secara teoritis :

1. Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi, dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang

tinggi pula guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yakni untuk mendapatkan cash flow dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Dewi (2013) yang menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini juga sesuai dengan Budiman (2012) yang menyimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Sari & Martani, 2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajaka atau diaudit oleh fiskus pajak.

3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sheilifer dalam Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri tapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.
4. Struktur dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Kurniash & Sari, 2013).
5. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan

meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sriwedari (2009) kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan termasuk komite audit yang bertugas dalam pengendalian kebijakan keuangan terutama dalam hal pajak diperusahaan.

b) Implikasi secara praktis :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berperan dibidang perpajakan, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mendeteksi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak agar selalu mengikuti aturan – aturan perpajakan yang telah ditentukan.
3. Penelitian ini juga memberikan tambahan pengetahuan baru bahwa variabel – variabel yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan dengan waktu pengumuman laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

C. Keterbatasan dan Saran

Kendala maupun kekurangan penelitian yang selanjutnya dikategorikan sebagai keterbatasan dari penelitian diantaranya :

1. Penghindaran pajak disini didasarkan laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh.
2. Peneliti hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.
3. Periode pengamatan yang diteliti hanya selama 5 tahun, sehingga belum dapat menggambarkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam jangka panjang.

Dari beberapa keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran bagi peneliti yang akan datang :

1. Untuk menambah sampel penelitian dengan periode yang berbeda ataupun dengan menambah periode yang lama dan juga yang baru.
2. Melakukan penelitian selain perusahaan manufaktur misalkan jenis industri perbankan atau yang lain.
3. Melakukan penelitian kembali terhadap variabel – variabel yang ditolak dalam pengujian hipotesis antara lain, kepemilikan keluarga dan kualitas audit.